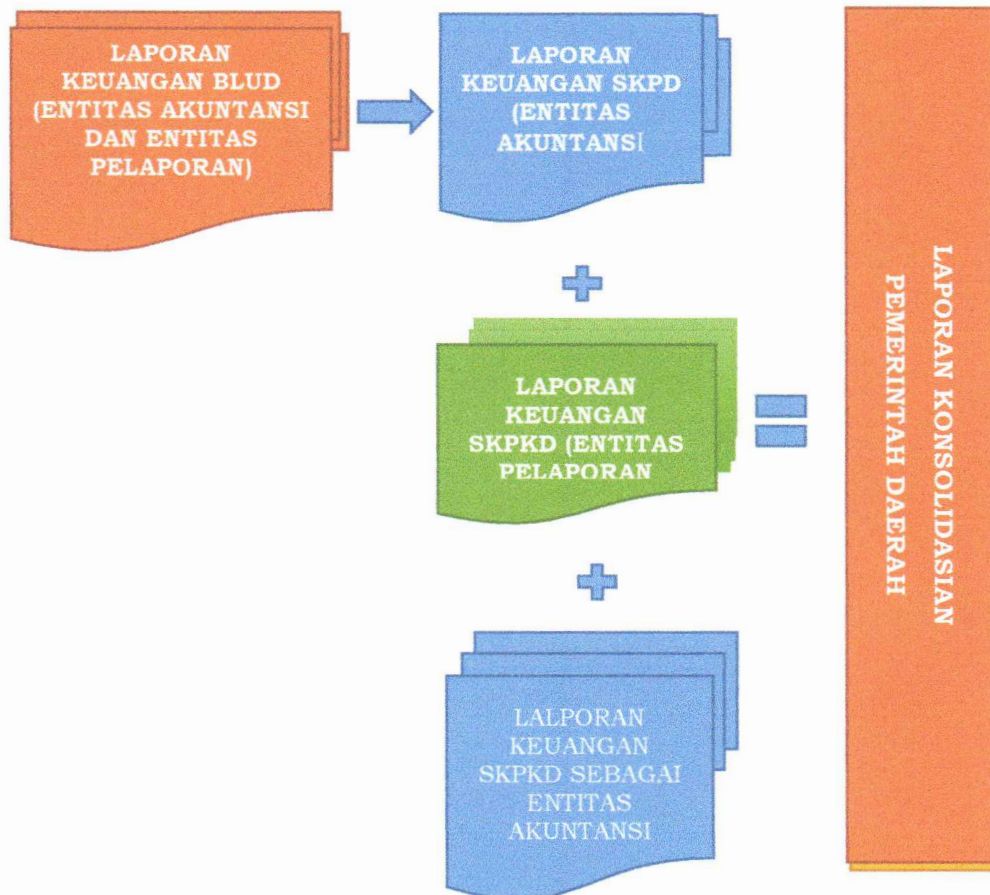


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH DAN BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BAB IV
SISTEM AKUNTANSI KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Laporan Keuangan Konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD/PPKD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili pemerintah daerah sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*home office – branch office*). PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.



KODE REK.	URAIAN	SKPD..A		SKPD ..B		SKPD PPKD		PEMDA	
		Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9=Σ	10=Σ
4.2.2.3	Dana Insentif Daerah - LRA								
4.2.2.3	Dana Desa								
4.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah								
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA								
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA								
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA								
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
5	BELANJA								
5.1	BELANJA OPERASI								
5.1.1	Belanja Pegawai								
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa								
5.1.3	Belanja Bunga								
5.1.4	Belanja Subsidi								
5.1.5	Belanja Hibah								
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial								
5.2	BELANJA MODAL								
5.2.1	Belanja Modal Tanah								
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan								
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya								
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya								
5.3	BELANJA TAK TERDUGA								
5.3.1	Belanja Tak Terduga								
5.4	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN								
5.4.2	Bantuan Keuangan								
	JUMLAH BELANJA DAERAH								
	SURPLUS / (DEFISIT)								
6	PEMBIAYAAN								
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN								
6.1.1	Penggunaan SiLPA								
6.1.4	Pinjaman Dalam Negeri								
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN								
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah								
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri								
	PEMBIAYAAN NETTO								
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)								

Catatan: akun sampai dengan level sub rincian objek (level 6)

- 2) Menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 7 dan 8 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LO Gabungan sebagai berikut:

No. Rek.	Uraian	SKPD A	SKPD B	SKPD C	PPKD	PEMDA
1	2	3	4	5	6	7=Σ
	KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN LO					
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO					
7101	Pajak Daerah-LO					
7102	Retribusi Daerah-LO					
7103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO					
7104	Lain-lain PAD yang Sah-LO					
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
7201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO					
720101	Dana Perimbangan - LO					
720102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO					
7202	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO					
720201	Pendapatan Bagi Hasil-LO					
720202	Bantuan Keuangan					
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO					
7301	Pendapatan Hibah-LO					
7303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO					
	JUMLAH PENDAPATAN LO					
8	BEBAN DAERAH					
81	BEBAN OPERASI					
8101	Beban Pegawai					
8102	Beban Barang dan Jasa					
810201	Beban Persediaan					
810202	Beban Jasa					
810203	Beban Pemeliharaan					
810204	Beban Perjalanan Dinas					
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada					
810206	Beban Barang dan Jasa BOS					
810207	Beban Barang dan Jasa BLUD					
8103	Beban Bunga					
8104	Beban Subsidi					
8105	Beban Hibah					
8106	Beban Bantuan Sosial					
8107	Beban Penyisihan Piutang					
8108	Beban Aset Ekstrakontable					

No. Rek.	Uraian	SKPD A	SKPD B	SKPD C	PPKD	PEMDA
1	2	3	4	5	6	7=Σ
8109	Beban Lain-lain					
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin					
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan					
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi					
8204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya					
8205	Beban Penyusutan Aset Lainnya					
8206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud					
8207	Beban Penyusutan Aset Lain-lain					
83	BEBAN TRANSFER					
8301	Beban Bagi Hasil					
8302	Beban Bantuan Keuangan					
84	BEBAN TAK TERDUGA					
8401	Beban Tak Terduga					
	JUMLAH BEBAN DAERAH					
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL					
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON					
74	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO					
7401	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non					
7402	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO					
85	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO					
8501	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non					
8502	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO					
8503	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO					
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA					
	SURPLUS / DEFISIT LO					

Catatan: akun sampai dengan level sub rincian objek (level 6)

- 3). Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 1, 2 dan 3 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan Neraca Gabungan. Namun khusus untuk penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat Neraca Gabungan. Worksheet untuk LRA, LO dan Neraca adalah sebagai berikut:

No Rek.	Uraian	SKPD A	SKPD B	SKPD ...	PPKD	ELIMINASI		PEMDA
						D	K	
1	2	3	4	5	6	7		8
1	ASET							
11	ASET LANCAR							
1101	Kas dan Setara Kas							
110101	Kas di Kas Daerah							
110102	Kas di Bendahara Penerimaan							
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran							
110104	Kas di BLUD							
110105	Kas Dana Bos							
110106	Kas Dana Kapitasi pada FKTP							
110107	Kas Lainnya							
110108	Setara Kas							
1102	Investasi Jangka Pendek							
1103	Piutang Pajak Daerah							
1104	Piutang Retribusi Daerah							
1105	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang							
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah							
1107	Piutang Transfer Pemerintah Pusat							
110701	Piutang Dana Perimbangan							
110702	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)							
1108	Piutang Transfer Antar Daerah							
110801	Piutang Bagi Hasil							
110802	Piutang Bantuan Keuangan							
1109	Piutang Lainnya							
110901	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang							
110902	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka							
110903	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran							
110904	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian							
110905	Uang Muka							
1110	Penyisihan Piutang							
111001	Penyisihan Piutang Pendapatan							
111002	Penyisihan Piutang Lainnya							
1111	Beban Dibayar Dimuka							
111101	Beban Dibayar Dimuka							
1112	Persediaan							
111201	Barang Pakai Habis							
111202	Barang Tak Habis Pakai							
111203	Barang Bekas Dipakai							
1113	Aset untuk dikonsolidasikan							
111301	RK SKPD							
JUMLAH ASET LANCAR								
12	INVESTASI JANGKA PANJANG							
1201	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen							
1202	Investasi Jangka Panjang Permanen							
120201	Penyertaan Modal							
120202	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah							
JUMLAH INVESTASI								
13	ASET TETAP							
1301	Tanah							
1302	Peralatan dan Mesin							

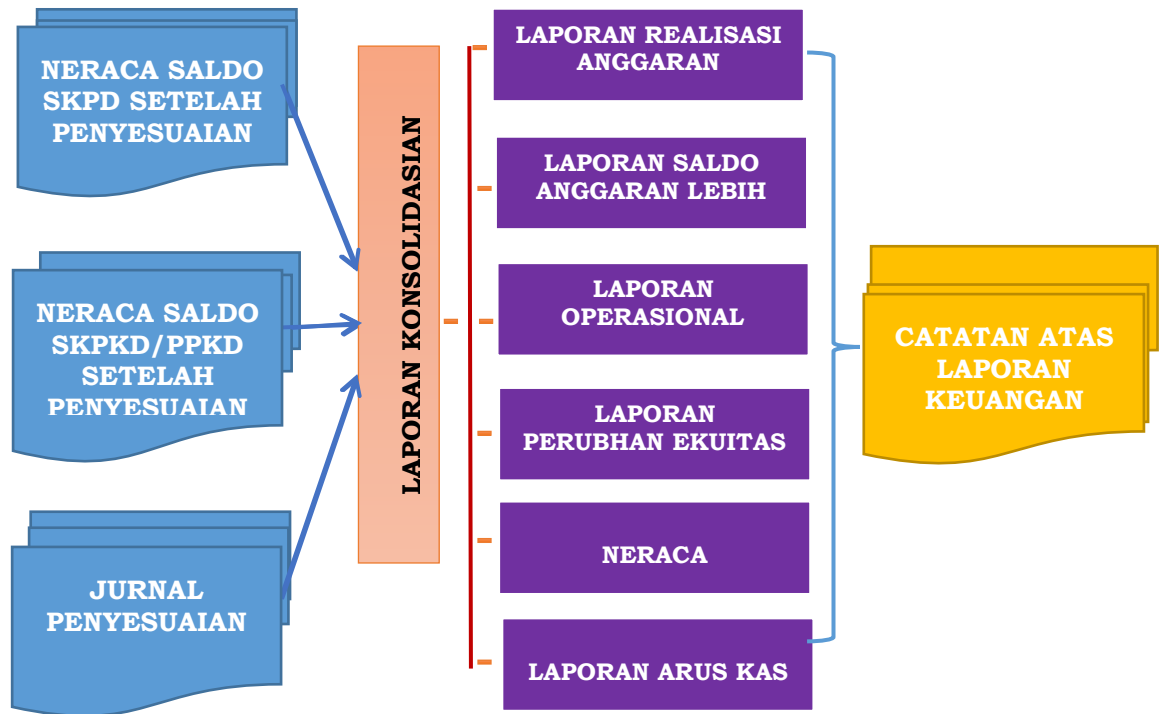
No Rek.	Uraian	SKPD A	SKPD B	SKPD ...	PPKD	ELIMINASI		PEMDA
						D	K	
1	2	3	4	5	6	7		8
1303	Gedung dan Bangunan							
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi							
1305	Aset Tetap Lainnya							
1306	Konstruksi dalam Pengerjaan							
1307	Akumulasi Penyusutan							
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan							
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan							
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan,							
130704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya							
JUMLAH ASET TETAP								
14	DANA CADANGAN							
1401	Dana Cadangan							
JUMLAH DANA CADANGAN								
15	ASET LAINNYA							
1501	Tagihan Jangka Panjang							
1502	Kemitraan dengan Pihak Ketiga							
1503	Aset Tak Berwujud							
1504	Aset Lain-lain							
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud							
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya							
JUMLAH ASET LAINNYA								
JUMLAH ASET								
2	KEWAJIBAN							
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
2102	Utang Bunga							
2103	Utang Pinjaman Jangka Pendek							
2104	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang							
2105	Pendapatan Diterima Dimuka							
2106	Utang Belanja							
210601	Utang Belanja Pegawai							
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa							
210603	Utang Belanja Bunga							
210604	Utang Belanja Subsidi							
210605	Utang Belanja Hibah							
210606	Utang Belanja Modal Tanah							
210607	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
210608	Utang Belanja Modal Gedung dan							
210609	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan							
210610	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya							
210611	Utang Belanja Tidak Terduga							
210612	Utang Belanja Bagi Hasil							
210613	Utang Belanja Bantuan Keuangan							
2107	Utang Jangka Pendek Lainnya							
210701	Utang Kelebihan Pembayaran PAD							
210702	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer							
210703	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan							
210704	Utang Transfer							
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK								
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							

No Rek.	Uraian	SKPD A	SKPD B	SKPD ...	PPKD	ELIMINASI		PEMDA
						D	K	
1	2	3	4	5	6	7		8
2201	Utang kepada Pemerintah Pusat							
2202	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank							
2203	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank							
2204	Utang kepada Masyarakat							
220401	Obligasi							
JUMLAH KEWAJIBAN								
JUMLAH KEWAJIBAN								
3	EKUITAS							
31	EKUITAS							
3101	Ekuitas							
310101	Ekuitas							
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan							
310301	RK PPKD							
JUMLAH EKUITAS								
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS								

Catatan: akun sampai dengan level sub rincian objek (level 6)

Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-PPKD dan RK- SKPD yang merupakan akun *reciprocal* yang bersifat sementara di tingkat Pemda (entitas pelaporan). Akun ini akan di eliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi.

2. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Pemerintah Daerah



Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Komponen LRA SKPD yang terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Defisit-LRA, SiLPA/SiKPA dikonsolidasikan dengan LRA PPKD yang terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan Neto, SiLPA/SiKPA menjadi LRA Pemerintah Daerah. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 4 (Pendapatan - LRA), 5 (Belanja dan Transfer), dan 6 (Pembiayaan) pada worksheet yang telah di gabungkan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Estimasi Perubahan SAL hanya disusun melalui sistem akuntansi SKPKD dengan mengkonsolidasikan akun Saldo Anggaran Lebih (SiLPA/SiKPA) dari seluruh entitas akuntansi. Laporan Arus Kas disajikan oleh entitas pelaporan.
3. Laporan Operasional (LO)

Komponen Laporan Operasional SKPD yang terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit-LO, dikonsolidasikan dengan Laporan Operasional PPKD yang terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit-LO, menjadi Laporan Operasional Pemerintah Daerah. Laporan Operasional (LO) dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 7 (Pendapatan-LO) dan 8 (Beban).
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Komponen Laporan Perubahan Ekuitas SKPD, yang terdiri dari Ekuitas (awal), Surplus/Defisit-LO, koreksi pada Ekuitas, RK-PPKD, dan Ekuitas (akhir), dikonsolidasikan dengan Laporan Perubahan Ekuitas PPKD yang terdiri dari Ekuitas (awal), Surplus/Defisit-LO, koreksi pada Ekuitas, dan Ekuitas (akhir), menjadi Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah
5. Neraca

Neraca SKPD dan Neraca PPKD dikonsolidasikan dengan menjumlahkan data akun kode rekening 1 (Aset), 2 (Kewajiban) dan 3 (Ekuitas), serta dengan mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal account) seperti RK-SKPD dengan RK-PPKD.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas dihasilkan dari sistem akuntansi PPKD terkait dengan transaksi menyangkut Kas di BUD. Laporan Arus Kas ini menjadi salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Arus Kas disajikan juga oleh entitas pelaporan seperti UPT yang mempunyai pola pengelolaan keuangan BLUD.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan memuat deskripsi dan penjelasan atas unsur-unsur yang tersaji pada lembar muka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sistematika penulisan CaLK sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan



1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.2 Kebijakan Keuangan

- 2.3 Strategi/Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 3.1 Ikhtisar Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3.2 Ikhtisar Pengelolaan Belanja Daerah
 - 3.3 Realisasi Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Peundang-Undangan
 - 3.4 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.5. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
- BAB VII PENUTUP

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Pejabat	
2	Asisten IT	
3	Kabag Hukum	24.
4	Isn. BUD	
5	Kahid Akuntansi	

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO